

Edisi 22/ Th.2/ Desember 2016

wartam

berpikir, berkata, berbuat dharma



Kentjanawathy Suwisma



....**resolusi**

Tripitama

3 pilar utama (Tattwa, Susila, Acara) 2017

ISSN 2442-6911
9 1772442 1691009
22/12/16 RP. 15.000,-

Wawanrasa dengan Kentjanawathy Suwisma Ketua WHDI . peranan ibu Hindu menghadapi medsos



Nyoman Yoga Segara

Sebagai “agama perjuangan”, Hindu pada titik tertentu harus “mengalah” pada kehendak negara. Sikap lunak ini dilakukan agar Hindu dapat diterima resmi, melengkapi agama Islam, Kristen dan Katolik yang lebih dulu diakui. Sebelumnya, Hindu memperjuangkan agama Tirtha, agama Hindu Bali, agama Hindu Dharma. Semuanya mentah.

Hindu, pada akhirnya harus mau melengkapi seperangkat syarat, seperti telah memiliki nama untuk agama, Tuhan, kitab suci, nabi, hari suci dan peranti administrasi lainnya. Andaikan saja sejumlah prasyarat ini dibuka lagi, mungkin Konghucu bukan agama terakhir yang akan diakui dan diterima resmi. Sebabnya, masih banyak “agama lokal” yang masih hidup subur, bahkan ada di tiap daerah seantero nusantara. Mereka, “agama lokal” itu sering mengklaim sebagai “agama asli” Indonesia, namun tidak mendapat pembinaan dan pelayanan, laiknya agama-agama impor yang malah diakui resmi.

Hindu hampir saja bernasib sama dengan “agama lokal” itu, dan mungkin hanya dikenang sebagai pembuka kran peradaban Indonesia. Tentang hal ini, tidak

ada penyangkalan oleh siapapun. Namun kini, kita tidak tahu, apakah harus bergembira atau bersedih dengan pemandangan itu. Yang jelas, Hindu telah menjadi agama, istilah yang juga masih bias dan *debatable*.

Dus, kabar baiknya Hindu mungkin terhindar dari tuduhan hanya sebagai paham, aliran, dan terburuk: sempalan agama. Hal lainnya, umat Hindu memiliki identitas yang jelas dan tegas. Umat Hindu juga bisa hidup berdampingan dengan umat lainnya, secara alamiah maupun sosial. Akses sebagai warga negara juga mulai terpenuhi. Soal masih ada diskriminasi, sindrom minoritas, itu soal lain yang bersifat relatif. Kita tidak mungkin bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita, apalagi berlebihan. Jika kita selalu belum puas, itu tanda kita dibayangi kesadaran palsu, delusif dan peyoratif.

Ketika para tokoh pada 1950 an sukses memperoleh pengakuan negara adalah “kemungkinan kecil” yang ketika itu sangat pantas dirayakan. Sayangnya memang, dan juga karena derasnya euforia yang mengalir ke gembiraan itu, beberapa hal krusial terpaksa harus

“dikorbankan”, termasuk mengikuti penyeragaman dari syarat-syarat yang diminta negara. Ada homogenisasi. Jika kini ada beberapa istilah yang seolah kurang tepat, harus ada kebesaran hati untuk memaklumi dan memaafkannya. Salah satu yang paling disorot di beberapa diskusi serius—termasuk di Wartam—adalah Tri Kerangka Dasar Agama Hindu (*tattwa, susila, upacara*).

Menurut beberapa cendikia, istilah ini dirasakan kurang *powerful*, seperti rakitan semata. Ada juga yang mengatakannya sebagai bahasa para elit, hanya dimengerti kaum terpelajar. Umat Hindu kebanyakan, yang jumlahnya lebih mayor, sering abai dan tidak begitu peduli. Kini, oleh para anak muda Tri Kerangka Dasar itu disebut kurang *kekinian*, imbasnya tidak menarik lagi. Situasi ini khas kontruksi budaya pop. Tapi riak ini juga harus dimaklumi sebagai panggilan jaman.

Revitalisasi atas sebuah istilah, terlebih istilah itu akan memiliki pengaruh besar untuk mendorong maju peradaban, bisa saja dimaknai sebagai kebutuhan elementer, sepanjang kebutuhan

Menyoal Pilar Keagamaan, Seperti Menerima Pilar Kebangsaan

masuk meng-
n dari syarat-
a negara. Ada
ika kini ada
ng seolah ku-
da kebesaran
lumi dan me-
ah satu yang
berapa diskusi
di Wartam—
ngka Dasar
ttwa, susila,

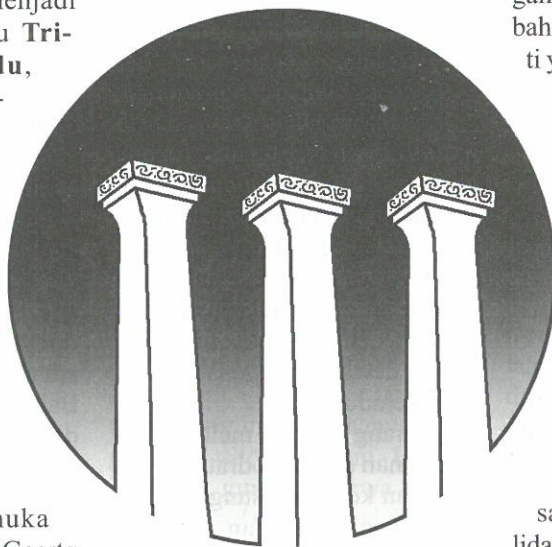
rapa cendikia,
an kurang po-
tan semata. A-
ngatakannya
ra elit, hanya
pelajar. Umat
n, yang jum-
or, sering abai
duli. Kini, oleh
Tri Kerangka
kurang keki-
idak menarik
has kontruksi
iak ini juga ha-
agai panggilan

tas sebuah is-
h itu akan me-
besar untuk
 peradaban, bisa
agai kebutuhan
ang kebutuhan

merevitalisasi itu dilalui meka-
nisme dan konsensus, serta di-
pastikan tidak merusak tatanan.
Artinya, timbangan baik buruk-
nya sudah dikantongi sejak awal.
Misalnya, **Tiga Kerangka
Dasar** sedikit diubah menjadi
Tiga Pilar Utama atau **Tri-
pitama Agama Hindu**,
rasanya tidak akan meng-
guncang sendi-sendi
beragama kita. Jika me-
nyitir kalimat klasik,
apalah arti sebuah nama
untuk urusan seserius
ini mungkin kurang
bijak, tetapi sebuah
wacana sangat bisa
menjadi ideologi,
apalagi sekadar iden-
titas. Kita, dan kehidupan
ini harus mengujinya.

Antropolog terkemuka
Amerika Serikat, Clifford Geertz
pernah menyebut Hindu, khu-
susnya di Bali memiliki ke-
mampuan untuk melakukan
internal conversion. Sesuatu
yang baru biasanya akan diuji
dulu, jika diamini oleh semua
orang, akan dipakai, jika tidak
segera dibuang. Contohnya, *bade*
beroda, dulang yang tak lagi
bundar, penjor *lebay*, minuman
kaleng di *pajegan*, aplikasi Halo

Pejati, baju sexy ke pura, dll. Jika
kini kita tidak melihat lagi be-
berapa fenomena itu, dapat di-
pastikan telah ada *internal con-
version*, juga karena bekerjanya
hukum Rta.



Tripitama Agama Hindu
boleh jadi terinspirasi dari dis-
kursus agung yang digemakan
para legislator mengenai “Empat
Pilar Kebangsaan”. Istilah ini
seketika memengaruhi kehidupan
berbangsa dan bernegara, men-
gubah paradigma 250 juta pen-
duduk Indonesia. “Empat Pilar
Kebangsaan” itu seolah mem-

bangunkan kembali Indonesia
yang besar, dan kita bersepakat
karena Pancasila, UUD 1945,
Bhineka Tunggal Ika dan NKRI
adalah pilar yang akan men-
jadikan Indonesia kembali disegani dunia sekaligus menyadari
bahwa keempatnya itu harga ma-
ti yang diperjuangkan mati-ma-
tian, penyangga tegaknya
Nusantara.

Awalnya, tak sedikit
yang dulu apriori dan
skeptik terhadap Empat
Pilar Kebangsaan itu
karena ada yang tidak
rela Pancasila, misalnya,
disebut pilar karena se-
jak masa perjuangan,
Pancasila itu dasar ne-
gara. Dasar Negara ber-
beda dengan Pilar Kebang-
saan, bukan? Tapi kini, kelu-
tidah kita sudah lancar menghafal
pilar-pilar kebangsaan itu. Apa-
kah **Tripitama** akan memiliki
arah kesuksesan seperti **Empat
Pilar Kebangsaan**? Layak
untuk terus dikritisi, didiskusi-
kan, dan ditunggu dengan sabar
saat kata iya bersahutan tanda
setuju.

*Penulis, Antropolog
IHDN Denpasar